



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

RENCANA PEMBELIAN KERETA REL LISTRIK BARU MELALUI PENYERTAAN MODAL NEGARA

Sulasi Rongiyati

Analisis Legislatif Ahli Madya
sulasi.rongiyati@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pasca-penolakan Pemerintah terhadap usulan impor kereta rel listrik (KRL) bekas asal Jepang, Pemerintah akhirnya menyarankan PT Kereta Commuter Indonesia (PT KAI Commuter) menambah KRL dengan melakukan pembelian KRL baru dan melakukan *retrofit* KRL di dalam negeri. Pembelian 3 rangkaian KRL baru akan dilakukan melalui impor dari Jepang. Seperti diketahui, total rangkaian KRL Jabodetabek yang akan dipensiunkan berjumlah 29 rangkaian. Jika tidak segera dilakukan penambahan KRL maka dikhawatirkan akan mempengaruhi pelayanan terhadap konsumen KRL Jabodetabek. Menurut Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Risal Wasal, biaya pengadaan KRL baru lebih tinggi dibandingkan dengan pembelian KRL bekas. Namun, rencana pembelian tiga *trainset* kereta *commuter line* akan memberikan keuntungan bagi operator KRL Jabodetabek, yaitu tidak perlu mengeluarkan biaya perawatan yang tinggi dibandingkan jika harus impor KRL bekas.

Selain membeli tiga rangkaian KRL baru dari Jepang, PT KAI Commuter juga akan mendatangkan 24 rangkaian KRL baru yang diproduksi oleh PT Industri Kereta Api (Persero) (PT INKA) untuk memenuhi kebutuhan armada hingga 2027. KAI Commuter diketahui telah menandatangani kontrak dengan PT INKA untuk pengadaan 16 rangkaian KRL baru dalam rangka penambahan kapasitas yang akan dikirimkan secara bertahap pada periode 2025 - 2026. Selanjutnya, delapan unit rangkaian KRL baru buatan PT INKA akan didatangkan pada 2027.

Berkaitan dengan rencana pembelian KRL baru tersebut, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengusulkan untuk memberikan tambahan modal melalui penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) (PT KAI) sebagai induk usaha PT KAI Commuter. Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo mengatakan bahwa Kementerian BUMN telah menjalin komunikasi dengan Kementerian Keuangan terkait dengan usulan pemberian PMN untuk anak perusahaan KAI tersebut. Lebih lanjut dikemukakan, skema PMN menjadi salah satu opsi yang akan ditempuh Kementerian BUMN untuk mendukung rencana impor rangkaian KRL baru pada tahun depan. *Vice President Corporate Secretary* KAI Commuter, Anne Purba mengatakan bahwa PT KAI Commuter terus berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan pemangku kepentingan lainnya terkait dengan upaya impor KRL tersebut.

Impor rangkaian KRL baru tersebut berada di luar rencana KAI Commuter karena sebelumnya perusahaan hanya mengalokasikan anggaran untuk mengimpor KRL bekas. Namun Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian dan Angkutan Antarkota Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Aditya Dwi Laksana menilai rencana pengusulan PMN kepada KAI Commuter untuk mengimpor tiga rangkaian KRL baru sudah seyakynya dilakukan.

Pembelian KRL baru tersebut berpotensi menekan arus kas KAI Commuter yang saat ini masih berupaya pulih dari dampak pandemi Covid-19. Namun, impor rangkaian KRL baru dengan menggunakan skema PMN juga berpotensi menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di sisi lain, kondisi keuangan KAI Commuter akan makin tertekan jika hanya mengandalkan pendanaan dari perusahaan atau induk perusahaannya.

Sehubungan dengan persoalan tersebut, terdapat beberapa opsi yang dapat dilakukan Pemerintah untuk membantu upaya pendanaan impor tiga rangkaian KRL baru. *Pertama*, pembelian tiga rangkaian KRL tersebut menggunakan PMN yang harus diusulkan terlebih dahulu ke DPR. *Kedua*, impor rangkaian KRL baru dilakukan dengan pendanaan yang berasal dari kombinasi antara anggaran yang dimiliki oleh KAI Commuter dan PMN. Melalui skema tersebut, pemerintah dapat menutupi selisih dana yang sebelumnya dialokasikan KAI Commuter untuk mengimpor rangkaian KRL bekas.

Suntikan dana Pemerintah melalui PMN memang menjadi opsi yang dipertimbangkan, selain menggunakan pendanaan dari KAI sebagai induk usahanya. Kepastian pendanaan tersebut dinilai sangat penting, karena penambahan rangkaian KRL ditujukan untuk peningkatan pelayanan pengguna. Bahkan, KAI Commuter juga mengkaji dampak dari pengadaan rangkaian KRL baru terhadap skema *public service obligation* (PSO) yang selama ini memangkas ongkos penumpang KRL.

Atensi DPR

Pemerintah berencana memberikan penyertaan modal negara (PMN) kepada PT KAI selaku perusahaan induk KAI Commuter, yang diperuntukan bagi impor tiga rangkaian KRL baru. PMN diperlukan karena pembelian KRL baru berpotensi menekan arus kas KAI Commuter. Terlebih impor KRL baru tersebut berada di luar rencana KAI Commuter, mengingat sebelumnya KAI Commuter hanya mengalokasikan anggaran untuk impor KRL bekas. PMN tersebut merupakan bentuk keikutsertaan Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di sektor transportasi, sekaligus dalam rangka mendukung industri perkeretaapian dalam negeri dengan me-retrofit dan pembelian 24 rangkaian kereta baru ke PT INKA sampai dengan 2027. DPR RI melalui Komisi VI perlu mendorong Pemerintah untuk memastikan pelaksanaan PMN PT KAI dan memastikan efektifitas penggunaan PMN, baik secara ekonomi maupun sosial. DPR juga perlu mengingatkan pemerintah untuk memastikan pelaksanaan *retrofit* dan pembelian rangkaian kereta baru dari PT INKA selesai sesuai jadwal yang ditentukan sehingga pelayanan terhadap masyarakat pengguna transportasi KRL tidak terhambat.

Sumber

Bisnis Indonesia, 5 Juli 2023;
cnbcindonesia.co, 5 Juli 2023;
sindonews.com, 6 Juli 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@anlegbkofficial

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyanti
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023